

# MAKNA KONFLIK ETNIK DAN RESOLUSI KONFLIK BAGI PEREMPUAN

SURWANDONO

*Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
surwan04@yahoo.com.au*

## Abstrak

Tulisan artikel ini akan menguraikan pandangan perempuan terhadap dinamika konflik etnis yang terjadi di Indonesia. Konflik etnis bagi perempuan cenderung dimaknai secara beragam. Dalam batas tertentu, tulisan ini menunjukkan bahwa konflik etnis dapat digunakan perempuan sebagai sarana mobilitas vertikal bagi perempuan di tengah marginalisasi mobilitas vertikal perempuan dalam situasi damai. Namun, kondisi ini hanya dapat diperankan oleh perempuan manakala perempuan memiliki kapasitas yang memadai sebagai aktor resolusi konflik etnis.

Analisis yang dikembangkan dalam artikel ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dalam membaca pandangan perempuan terhadap konflik etnis. Dan kemudian dikembangkan analisis interpretatif terhadap makna konflik etnis bagi perempuan melalui *Focus Group Discussion*.

*Kata Kunci: Konflik Etnik, Perempuan, Kapasitas*

## Pendahuluan

Indonesia mengalami kontraksi konflik etnik yang serius dalam kurun 10 tahun terakhir. Tidak kurang dari konflik etnik di Aceh antara etnik Aceh dengan Pujakusuma (Putra Jawa Keturunan Sumatera), Sampit antara etnik Madura dan Dayak, Poso antara etnik Muslim dan Nasrani, Ambon antara Muslim dan Nasrani serta konflik etnis

rasial konvensional Indonesia antara etnis pribumi dan non pribumi (Cina) di Jawa. Perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan menanggung beban konflik etnik dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain.

Dalam beragam studi tentang konflik etnik di beberapa negara, seperti di Afghanistan, Siere Leone, Kosovo,

maupun di Burundi, perempuan merupakan elemen masyarakat yang paling berpotensi menanggung beban yang paling besar dari keberadaan konflik etnik, dari peluang menjadi korban pelecehan seksual, sebagai pengungsi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi penyangga kehidupan ekonomi keluarga jika para suami-suami telah menjadi korban. Bagi perempuan, semua hal tersebut merupakan pengalaman traumatik bagi perempuan yang sering tak mampu untuk mengungkapkan secara langsung oleh korban.

Ross Marlay & Clark D (1999) menjelaskan bahwa tradisi politik Indonesia cenderung berwatak *paternalistik* (Ross Marlay & Clark D Neher, sebuah tradisi yang menempatkan laki-laki sebagai aktor terpenting dalam proses pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya pengambilan keputusan tentang konflik. Kondisi ini akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi pinggiran dalam pengambilan keputusan, yang dalam konteks konflik etnik perempuan justru menjadi korban terbesar dari pilihan politik etnik dalam konflik. Inilah yang menjadi bias, jika perempuan berpotensi sebagai korban dalam politik konflik, seharusnya perempuan justru menjadi aktor penting dalam proses pengambilan keputusan tentang konflik, sehingga probabilitas pilihan keputusan tidak akan merugikan perempuan.

Tradisi dominannya laki-laki dalam pengambilan keputusan tentang konflik, disikapi Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan Resolusi DK PBB No. 1325 yang menyatakan;

*SCR 1325 reaffirms 'women's central role in the prevention and resolution*

*of conflicts and in peace-building', and stresses 'the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to increase their role in decision-making with regard to conflict prevention and resolution'.*

Konflik etnis difahami sebagai hubungan antar etnik yang tidak harmonis. Menurut William Chang, timbulnya konflik sosial yang bernuansa etnis dan rasial tidak hanya melukai keutuhan bangsa, tetapi juga mencabik kodrat keutuhan bangsa. Gejala etnonasionalisme tampaknya bakal menggerogoti keutuhan bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan ketakutan, kecemasan dan kecurigaan diantara sesama warga bangsa yang kesemuanya ini menjadikan kehidupan bangsa tidak kondusif. Konflik sosial yang muncul dalam masyarakat majemuk sebenarnya bukan merupakan peristiwa yang luar biasa. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi bangsa Indonesia akibat perbedaan-perbedaan, baik fisik, adat-istiadat, bahasa, maupun budaya. Dalam pemaknaan terhadap konflik etnik, para penstudi konflik etnik melakukan 3 kategorisasi dalam upaya memahami konflik etnik dalam 3 perspektif. Pertama, **pendekatan primordialis**. Dalam pendekatan ini mengasumsikan konflik etnik terjadi karena masing-masing etnik saling mengembangkan kesetiaan pertama (*prime-order*). Kesetiaan pertama biasanya terkait dengan ikatan-ikatan kesukuan, tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, ataupun ikatan keagamaan. Pemaknaan ini menyimpulkan bahwa konflik dalam titik tertentu akan bersifat *zero sum game*, se-

hingga ada kecenderungan hilangnya atau terpinggirnya etnis yang lain sebagai kondisi yang idial. Konflik dianggap berguna baik di kalangan elit dan massa karena dengan konflik identitas kelompok akan terjaga.

Dalam konteks kepentingan perempuan, konflik karena alasan identitas juga tidak selamanya menguntungkan perempuan. Memang ada sebuah asumsi bahwa tata nilai dalam etnis tertentu merupakan kearifan yang akan membawa keseimbangan dalam komunitas etnis. Hadirnya tata aturan baru dari etnis yang lain, senantiasa diasumsikan akan merugikan kepentingan etnis pada umumnya, dan termasuk di antara kepentingan perempuan.

Kedua, **pendekatan instrumentalis**. Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa konflik terjadinya karena konflik dijadikan sebagai sarana atau alat bagi elit-elit politik dalam etnik atau agama, baik lokal, nasional dan internasional untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politik, ekonomi, social dan budaya. Konflik justru akan menghantarkan seseorang akan menjadi figure yang dihormati dan mendapatkan akses yang lebih besar sebelum timbulnya konflik. Sehingga konflik etnik difahami sebagai sebuah *issue* krusial yang mampu menghantarkan individu atau kelompok social mendapatkan posisi yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini, kebergunaan konflik hanya bersifat terbatas dan *artificial*, di mana elit politik yang justru mendapatkan keuntungan sedangkan masyarakat yang akan mengalami kerugian. Namun, terdapat kecenderungan tidak semua kalangan masyarakat termasuk perempuan me-

nyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan elit. Mobilisasi elit terhadap masyarakat untuk berkonflik dengan etnis yang lain, dianggap masyarakat sebagai kebutuhan masyarakat secara riil dan bukan kebutuhan elit semata. Kebergunaan konflik etnis jadi semakin minor manakala masyarakat mengetahui bahwa mereka selama ini telah "diperkuda" oleh elit untuk kepentingannya.

Namun dalam konteks kepentingan perempuan, konflik etnis memiliki kecenderungan meskipun masih bersifat minor sebagai gejala instrumentalis "tidak sengaja". Perempuan bukan menjadi actor intelektual dibalik konflik etnis, namun dalam kondisi tertentu, terdapat sebagian perempuan yang bisa memanfaatkan kondisi konflik untuk melakukan mobilitas politik, social dan ekonomi yang lebih luas. Perempuan yang mampu *manage* konflik etnis dan mengartikulasikan kapasitas individual dan kelompoknya dalam masyarakat, memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan dari konflik etnis.

Ketiga, **pendekatan konstruktivis**. Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa konflik etnis sebagai hasil pekerjaan dari fihak-fihak di luar etnik yang berkonflik untuk mendapatkan keuntungan dari konflik yang tercipta. Semakin konflik etnik berkembang dan marak, maka fihak-fihak yang menciptakan konflik akan mendapatkan keuntungan yang semakin membesar.

Dalam konteks kepentingan perempuan, konstruksi konflik etnis sesungguhnya sebagai bagian dari konstruksi laki-laki yang saling memperebutkan sumber daya. Perempuan dalam posisi hanya sebagai subyek

dan obyek penyerta. Dalam konteks ini, kepentingan perempuan akan sangat terugikan, karena hanya menjadi "pelanduk" di tengah para Gajah yang sedang berkonflik.

Studi tentang peranan perempuan dalam politik konflik dan resolusi konflik telah dilakukan oleh Babbit and Pearson-D'Estree. Keduanya melakukan observasi terhadap proses resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik yang kronis dalam konflik Palestina-Israel, menyatakan wanita memiliki keunggulan spesifik dalam proses penyelesaian konflik etnik sehingga upaya pelibatan wanita dalam politik dan resolusi konflik cenderung produktif;

*conflict resolution workshops with just women came out with more constructive discussions than groups with mixed gender. There is a relative notion that women are very trustworthy, dependable, and exhibit a high level of honesty and integrity. Women are dedicated, reliable and committed to family and national aspirations and goals. Women, the life givers of the world, therefore have a stake in the world pursuit of peace since they exhibit a high level of perseverance, patience and tolerance in achieving set objectives. Surprisingly, women have not walked away unconcerned either because of anger or fear, they have been proactive in the resolution of conflicts, but their roles have before now not been given deserved prominence and recognition (1996, h. 521-529).*

Studi yang dilakukan oleh Elizabeth Sidney, menemukan korelasi positif antara keterlibatan perempuan dalam politik konflik dengan semakin berkurangnya dampak konflik terhadap degradasi kualitas hidup perempuan.

*Empowering women in post conflict situations is a difficult process due to the variety of ways in which women are affected in conflict — such as by violence including sexual abuse, widowhood, poverty and lack of security. One way of achieving empowerment is through political participation and leadership positions. Research suggests that an increase in levels of political participation by women may follow a period of conflict or a transition to democracy, because gender roles are usually challenged.*

Berbagai konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia selama ini sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan masalah kebudayaan. Merujuk pendapat Sutarto, dalam setiap kebudayaan yang menjadi kerangka dasar pola berpikir dan bertindak laku manusia sebenarnya di dalamnya mengandung nilai-nilai universal yang disebut kearifan lokal. Kearifan lokal ini dalam kehidupan nyata berupa terwujudnya kehidupan yang teratur sesuai dengan norma-norma dan sistem nilai yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak laku. Namun, ada kecenderungan kearifan lokal akan menjadi produktif dalam komunitas etnik yang homogen, sedangkan jika kearifan lokal etnik tertentu diterapkan dalam komunitas multi-etnik, maka cenderung melahirkan beragam konflik budaya.

### **Kerangka Dasar Teoretik**

Penelitian dari Sindung Haryanto, menunjukkan bahwa Peran perempuan dalam konflik sosial masih terbatas pada upaya pencegahan terjadinya konflik atau dengan kata lain masih terbatas pada upaya membangun perdamaian (*peace building*). Dalam upaya

rekonsiliasi konflik, peran perempuan masih terpinggirkan. Penyelesaian konflik dalam pandangan masyarakat merupakan "urusan laki-laki". Peran perempuan terdomestifikasi dalam hal ini misalnya dalam pertemuan rekonsiliasi konflik, perempuan "ditugaskan" dalam menyediakan kebutuhan konsumsi. Potensi perempuan dalam upaya rekonsiliasi konflik maupun dalam upaya "peace building" masih cukup besar mengingat terdapat banyak lembaga lokal dan organisasi lokal yang didalamnya terdapat anggota dari berbagai perempuan lintas golongan. Hal ini sebenarnya merupakan strategi *cross cutting organization* yang berfungsi sebagai peredam konflik antar golongan.

### Metode Penelitian

#### a. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang posisi dan peranan perempuan dalam politik konflik etnis di Indonesia. Posisi dan peran tersebut meliputi: 1) bagaimana posisi perempuan dalam politik konflik etnis di Indonesia, 2) bagaimana peranan perempuan dalam konflik etnis di Indonesia, 3) bagaimana perempuan memaknai konflik etnis. Setelah mendapatkan pemahaman mendalam tentang posisi dan peran perempuan dalam konflik di Indonesia, dilakukan proses transformasi posisi dan peran perempuan dalam membangun perdamaian etnis. Hal ini dilakukan melalui penyusunan modul resolusi konflik etnis yang berperspektif gender dan kemudian mensosialisasikannya kepada para anggota keluarga korban konflik etnik.

#### b. Teknik pengumpulan data

Data penelitian didapat dari sumber utama yaitu para perempuan yang terlibat atau terkena dampak konflik etnis di beberapa daerah konflik melalui metode semi structured group dan deep interview. Data ini dikumpulkan melalui penelitian survai terhadap 200 responden, yang terdiri dari aktivis beberapa kampus di Yogyakarta, maupun pengurus Organisasi Mahasiswa Daerah di Asrama Mahasiswa Daerah di Yogyakarta. Untuk melengkapi data primer dari survai dilaksanakan FGD pada 2 Agustus 2009 yang bertempat di Ruang Sidang Mini, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY. Data sekunder diperoleh dari kajian dokumentasi; baik dari ekspos media massa dalam mengkonstruksikan derajat dekadensi kualitas hidup perempuan konflik etnik di Poso, Ambon dan Sampit serta penentuan alat ukur yang memadai untuk dipergunakan dalam penyusunan angket survai dan pelaksanaan FGD.

#### c. Teknis analisis data

Dalam penelitian ini, obyektivikasi data dilakukan melalui dua tahap. Pertama, analisis terhadap hasil survai yang akan digunakan sebagai data awal bagi pelaksanaan FGD. Kedua, analisis terhadap hasil survai yang dikaitkan dengan pelaksanaan FGD, di mana responden mendapatkan kesempatan yang luas untuk bertutur tentang sesuatu hal yang terkait dengan konflik, baik pengalaman, trauma ataupun harapan ke depan terhadap fenomena konflik di Indonesia. Pekerjaan analisis yang dilakukan adalah mengorganisasikan temuan dari pelaksanaan survai untuk kemudian, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut

dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis ini kemudian diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan di lapangan.

d. Populasi dan sampel

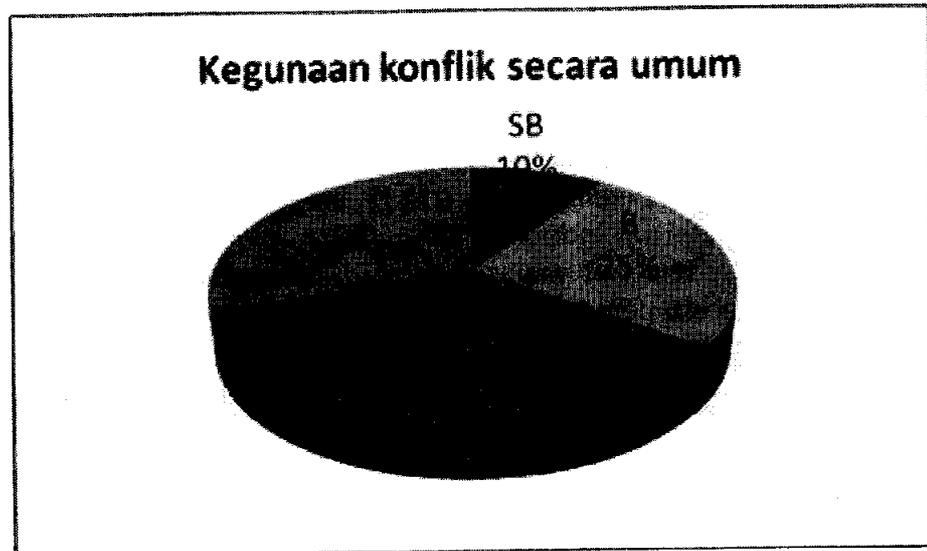
Populasi penelitian adalah perempuan yang menjadi keluarga korban konflik etnis di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat (Sampit), Sulawesi Tengah (Poso), dan Maluku (Ambon) yang diwakili oleh anggota keluarga yang sedang studi di Yogyakarta. Penentuan Sampel dilakukan melalui *purposive random sampling*, yang dimaksudkan guna mengetahui posisi keluarga korban konflik, yaitu anggota keluarga korban konflik, perempuan,

memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang politik konflik etnik di Poso, Ambon, dan Sampit, dan sedang studi di Yogyakarta.

**Hasil Penelitian Pandangan Umum Perempuan Terhadap Kegunaan Konflik**

Konflik secara harafiah bagi perempuan, adalah sesuatu yang menakutkan dan menimbulkan kesan traumatis. Perempuan yang secara kodrati memiliki watak feminim, yang cenderung menyukai kelembutan, memandang konflik sebagai dunia "laki-laki" yang berpotensi merugikan kepentingan perempuan.

**Diagram 1**



Sumber : data Primer

Keterangan : SB : Sangat Berguna; B : Berguna; BS : Biasa; TB : Tidak Berguna; STB : Sangat Tidak Berguna

Dari *chart* tersebut menunjukkan bahwa 30% responden menyatakan konflik sebagai sesuatu yang sangat tidak berguna, 18% menyatakan konflik sebagai sesuatu yang tidak

berguna. Pandangan ini setidaknya menggambarkan bahwa perempuan memandang konflik etnis sebagai gejala kontruksi dari arogansi kepentingan laki-laki. Laki-laki yang mem-

buat keputusan untuk berkonflik, yang seringkali tidak melibatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, namun memaksa perempuan terkena dampak dari konflik.

Sementara itu 25% responden menyatakan bahwa konflik sebagai sesuatu yang berguna dan 10% mengatakan konflik adalah sesuatu yang sangat berguna. Kondisi ini menggambarkan bahwa sesungguhnya perempuan yang memiliki keberanian dan kreativitas yang tinggi selama konflik berlangsung, atau lebih tepatnya tatkala terjadi genocata senjata atau jeda kemanusiaan, akan berpeluang meningkatkan status sosial perempuan dalam masyarakat. Konflik justru memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk mengartikulasikan kapasitas yang dimiliki kalangan perempuan, di bandingkan dengan kondisi normal.

Bagi responden yang menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang sangat tidak berguna dan tidak berguna (sejumlah 38%), sangat mungkin dilatar belakangi oleh dampak yang timbul akibat terjadinya konflik seperti efek traumatis yang dirasakan karena kehilangan anggota keluarga, menjadi saksi tindak kekerasan, ataupun melihat dan menanggung kerusakan fisik sarana dan prasarana di lingkungan tempat mereka tinggal, menjadi tulang punggung keluarga ketika suami menjadi korban konflik maupun dampak-dampak konflik yang lainnya yang harus dirasakan perempuan.

Sementara bagi responden yang menyatakan konflik sebagai sesuatu yang berguna dan sangat berguna (sebanyak 35% responden) karena konflik dianggap sebagai sarana untuk "mencabut duri dalam daging" karena keberadaan

anggota masyarakat dalam lingkungan mereka hanya menimbulkan persoalan, keresahan, kekacauan atau kerugian dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konflik juga dapat digunakan sebagai sarana "pembersihan" dan menciptakan tatanan masyarakat baru yang lebih baik sesuai dengan harapan mereka, atau dapat juga konflik adalah sumber perolehan keuntungan bagi segelintir orang, seperti keuntungan secara politis dan ekonomi.

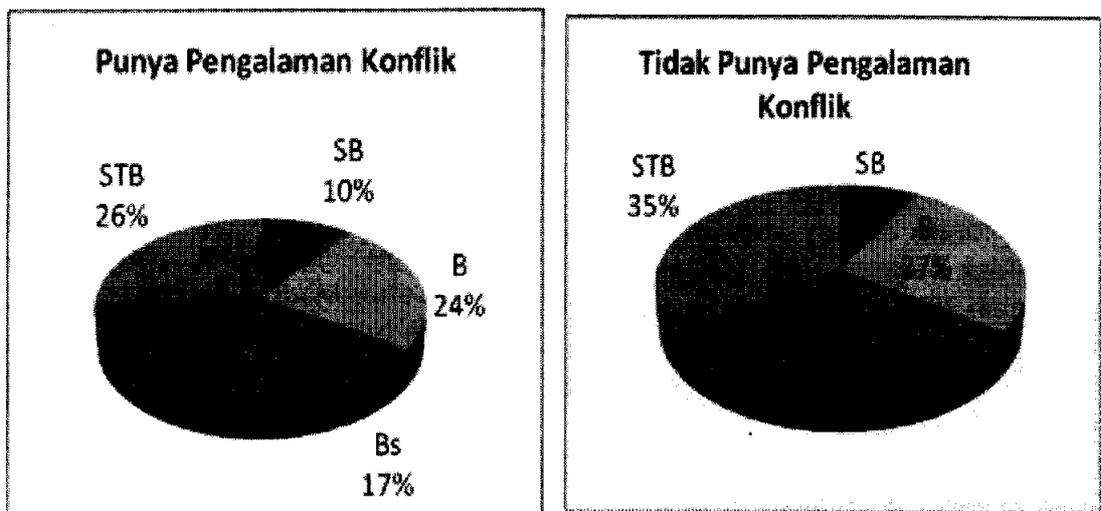
Data responden tersebut semakin dikuatkan dalam *forum group discussion (FGD)*, di mana seorang peserta menggambarkan bagaimana konflik dapat berguna dalam kehidupan. Ia menceritakan tentang konflik yang terjadi di Sambas Kalimantan Tengah antara etnis Melayu dan Madura. Ia menganggap bahwa konflik yang terjadi di wilayahnya dapat membantu etnis Melayu di sekitar tempat tinggalnya untuk membersihkan etnis Madura yang dianggap "menggangu" kehidupan mereka. Karakter etnis Madura yang berperilaku kasar dan tukang serobot tanah warga, menjadi pemicu gesekan-gesekan yang bermuara pada meletusnya konflik etnis di Sambas. Sehingga konflik yang terjadi seolah-olah menjadi sarana untuk membersihkan sumber persoalan dalam kehidupan masyarakat Melayu di Sambas. Akibatnya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan dan pembersihan etnis Madura di Sambas dianggap sebagai tindakan yang benar. Dan menguntungkan bagi mereka, karena dapat cepat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Hasil yang hampir sama juga diperoleh ketika responden dipilah menjadi responden yang memiliki pengalaman konflik dan tidak punya pengalaman konflik. Mayoritas responden baik yang

memiliki pengalaman konflik dan yang tidak memiliki pengalaman konflik memiliki pandangan yang hampir sama terhadap konflik, yaitu konflik adalah sesuatu yang tidak berguna. Hal ini dapat dilihat dari sebanyak 49 % responden yang memiliki pengalaman konflik mengatakan konflik etnis sebagai sesuatu yang tidak berguna ( 26% persen menyatakan konflik sebagai sesuatu yang sangat tidak berguna dan 23 % menyatakan konflik sebagai sesuatu yang tidak berguna), sementara sebanyak 46% responden

yang tidak memiliki pengalaman konflik menyatakan konflik adalah sesuatu yang tidak berguna ( 35% responden menyatakan konflik adalah sesuatu yang sangat tidak berguna dan 11 % menyatakan tidak berguna). Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang responden baik yang punya maupun tidak punya pengalaman konflik sama-sama memberikan mereka preferensi bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak berguna. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari *chart* berikut ini :

**Diagram 2**



Sumber : data Primer

Keterangan : SB : Sangat Berguna; B : Berguna; BS : Biasa; TB : Tidak Berguna; STB : Sangat Tidak Berguna

Sementara itu responden yang menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang berguna dari latar belakang punya pengalaman dan tidak punya pengalaman konflik juga menunjukkan kecenderungan jumlah responden yang sama. Jika responden yang memiliki pengalaman konflik sejumlah 34

% menyatakan bahwa konflik berguna, maka 35% responden dengan latar belakang tidak punya pengalaman konflik juga menyatakan hal yang sama. Dari data tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa latar belakang responden tidak berpengaruh dalam memberikan preferensi terhadap

pandangan mereka terhadap konflik, apakah konflik itu berguna atau tidak. Sementara itu 17 % responden yang memiliki pengalaman konflik dan 19% responden yang tidak mempunyai latar belakang konflik mengatakan biasa saja.

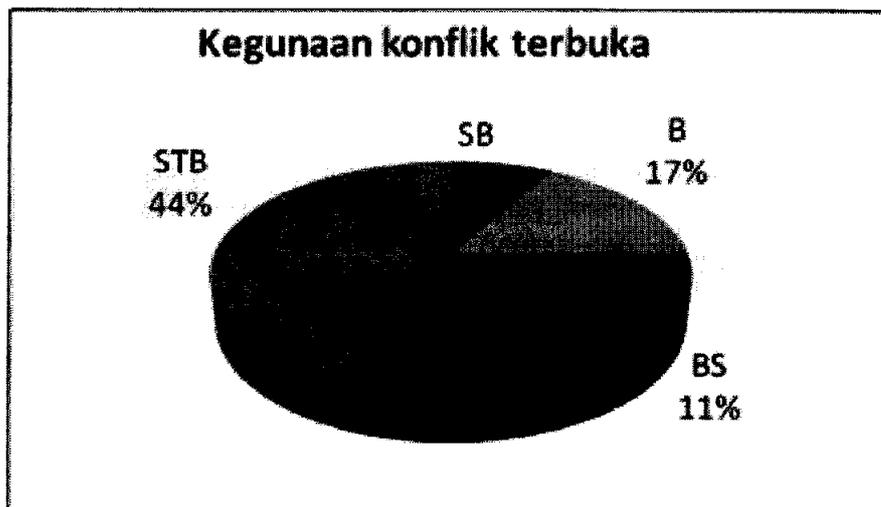
**Pandangan Perempuan terhadap Konflik Etnis Yang Terbuka**

Konflik etnis yang berekskalasi menjadi konflik terbuka, dimaknai sebagai proses perubahan setting konflik

dari konflik yang bersifat *debates* dan *games* menjadi konflik yang mencerminkan *wars*, di mana unsur penggunaan kekerasan dalam konflik menjadi lebih mengemuka. Secara harafiah, perempuan tidak menyukai atau takut terhadap fenomena kekerasan dengan alasan bahwa kekerasan diasumsikan sebagai dunia laki-laki.

Bagaimana kalangan perempuan melihat perubahan konflik etnis yang berubah menjadi fenomena kekerasan etnis atau yang sering disebut genosida?

**Diagram 3**



Sumber : data Primer

Keterangan : SB : Sangat Berguna; B : Berguna; BS : Biasa; TB : Tidak Berguna; STB : Sangat Tidak Berguna

Konflik etnis yang bersifat terbuka atau munculnya fenomena kekerasan, telah menyebabkan turunya kegunaan konflik dari 40% menjadi sekitar 25%. Di sisi lain juga terjadi pergeseran yang sangat signifikan dari jumlah responden yang menyatakan tidak berguna, yang sebelumnya hanya sekitar 41% menjadi 52%. Fenomena ini disebabkan oleh ketakutan dari kalangan perempuan bahwa konflik yang bersifat terbuka akan menye-

babkan perempuan lebih banyak menjadi korban karena keterbatasan perempuan dalam mempertahankan diri. Konflik yang menjurus ke arah genosida, dalam banyak pengalaman di beberapa negara, telah menempatkan perempuan sebagai obyek penderita dari konflik. Ketakutan terjadinya pemerkosaan dan pembunuhan massal pada perempuan merupakan salah satu issue yang mengemuka.

Analisis ini mendapatkan konfirmasi dalam FGD, di mana hampir keseluruhan peserta yang hadir sepakat bahwa konflik etnis yang terjadi di Indonesia lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Meskipun mereka sebagian besar tidak memiliki pengalaman konflik, namun mereka cenderung melihat (terutama melalui pemberitaan dan tulisan-tulisan) bahwa konflik lebih banyak membawa penderitaan dan kesengsaraan, terutama bagi perempuan yang lebih banyak berada pada posisi pasif dalam sebuah konflik yang terjadi.

**Keterlibatan Perempuan sebagai Aktor Resolusi Konflik Etnis**

Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan perempuan sebagai aktor resolusi konflik etnis, maka responden diajukan lima pertanyaan yaitu bagaimana keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik secara umum, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan penyelesaian konflik, keterlibatan perempuan dalam

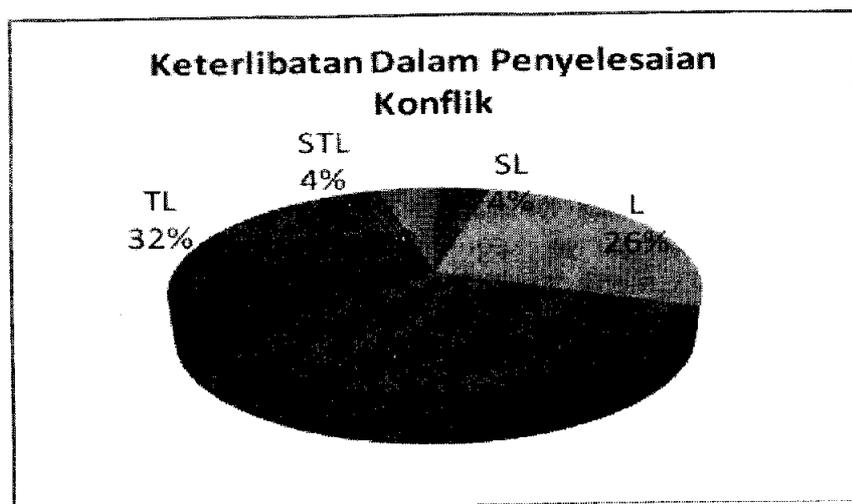
negosiasi, keterlibatan perempuan dalam penyusunan naskah perjanjian, dan keterlibatan perempuan dalam implementasi perdamaian.

1. Keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik secara umum

Dalam beberapa studi sebelumnya, sebagaimana yang telah diteliti oleh Sindung Haryanto, Endah Trista Agustina, Maria Pakpahan, maupun AGN Ari Dwipayana, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik konflik maupun resolusi konflik cenderung belum maksimal. Apakah survei ini semakin menguatkan temuan sebelumnya atau menawarkan perspektif baru?

Dari survei yang dilakukan, secara umum 30 % responden mengatakan perempuan dilibatkan dalam penyelesaian konflik etnis, sementara 36% responden mengatakan tidak dilibatkan dan 34 % mengatakan biasa saja. Hal tersebut nampak dalam *chart* berikut ini :

**Diagram 4**



Sumber: Data Primer

Keterangan : SL : Sangat dilibatkan; L : Dilibatkan; Bs : Biasa; TL : Tidak dilibatkan; STL : Sangat Tidak Dilibatkan

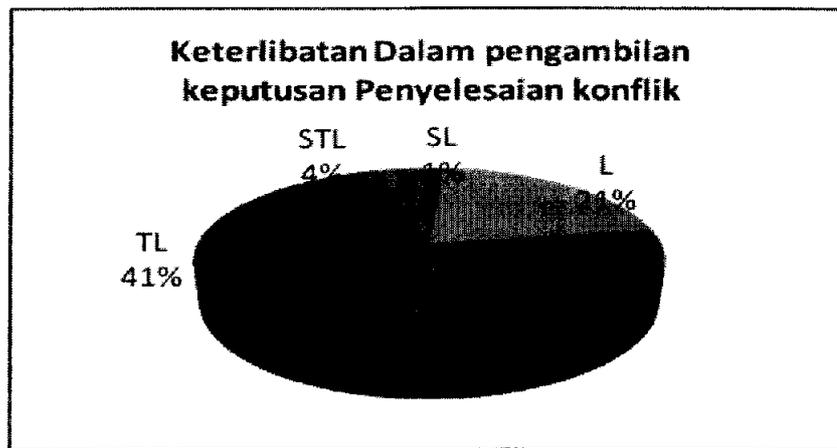
Diagram ini menunjukkan temuan yang baru dari temuan sebelumnya, di mana keterlibatan perempuan relatif sudah besar, yang mencapai angka 30% dan hanya selisih sekitar 6% saja dari pandangan responden yang menyatakan bahwa perempuan tidak dilibatkan dalam konteks penyelesaian konflik. Temuan baru ini bisa jadi disebabkan oleh pengalaman konflik etnis di sekitar tahun 2005 sampai 2009, di mana sudah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas perempuan sebagai aktor resolusi konflik dalam konflik etnis sebelumnya. Sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memotret kiprah perempuan sebagai aktor resolusi

konflik dalam konflik etnis sebelum tahun 2000.

## 2. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan penyelesaian konflik

Dalam konteks pengambilan keputusan penyelesaian konflik terdapat sekitar 22% responden yang mengaku dilibatkan. Turun dari sekitar 6% dari angka sebelumnya yang mencapai 30%. Demikian pula terdapat sekitar 44% yang merasa tidak dilibatkan, angka ini justru mengalami kenaikan hampir 8% dari sebelumnya yang hanya sekitar 34%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam *chart* berikut ini :

**Diagram 5**



Sumber: Data Primer

*Keterangan : SL : Sangat dilibatkan; L : Dilibatkan; Bs : Biasa; TL : Tidak dilibatkan; STL : Sangat Tidak Dilibatkan*

## 3. Keterlibatan perempuan dalam negosiasi

Keterlibatan perempuan dalam proses penyelesaian konflik melalui negosiasi ternyata semakin memperkecil peran perempuan. Sebanyak 50 % responden menyatakan perempuan tidak dilibatkan dalam proses negosiasi, sementara 18 % menyatakan

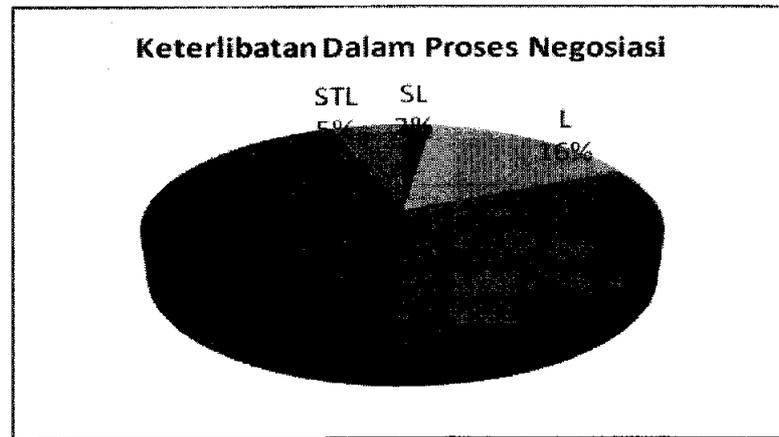
perempuan ikut dilibatkan dan sisanya sebanyak 32% menyatakan biasa. Kondisi ini mencerminkan bahwa perempuan dianggap oleh kalangan laki-laki tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk bernegosiasi.

Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena yang umum. Di level negosiasi formal, dan internasional saja, PBB

menyatakan partisipasi perempuan sebagai negosiator sangat minim. Hal inilah yang kemudian memaksa PBB untuk mengeluarkan resolusi yang

memberikan syarat minimum keterlibatan perempuan sebagai *negotiator* dalam forum-forum perundingan.

**Diagram 6**



Sumber: Data Primer

Keterangan : SL : Sangat dilibatkan; L : Dilibatkan; Bs : Biasa; TL : Tidak dilibatkan; STL : Sangat Tidak Dilibatkan

#### 4. Keterlibatan perempuan dalam penyusunan naskah perjanjian

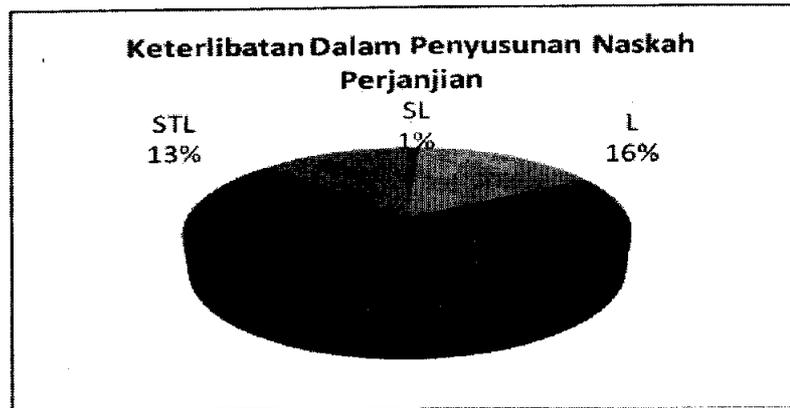
Penyusunan naskah perjanjian dalam studi negosiasi sering disebut sebagai proses *legal drafting*, yakni kegiatan untuk menyiapkan *item* dan *issue-issue* yang akan dinegosiasikan sehingga terbangun suatu regim negosiasi. Agar regim negosiasi tersebut dapat berjalan secara efektif, studi di Abbot menyatakan perlu mempertimbangkan 3 hal, pertama, presisi, terkait dengan pemilihan *issue* dan konsesi yang dipertukarkan, kedua, obligasi, terkait dengan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang bernegosiasi agar implementasi hasil negosiasi bisa berjalan, dan ketiga, delegasi, terkait dengan pilihan siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses monitoring

pelaksanaan implementasi negosiasi.

Survei menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam penyusunan naskah perjanjian, sebanyak 55% responden menyatakan perempuan tidak dilibatkan, 17% menyatakan dilibatkan dan 28% menyatakan biasa saja.

Fakta ini atas menunjukkan bahwa aktor perempuan cenderung hanya menjadi asesoris dalam pelaksanaan penyusunan draft negosiasi. Dalam beberapa kasus dalam penyelesaian konflik di Ambon dan Poso, perempuan hanya berperan membawa naskah, bukan menyiapkan naskah. Perempuan hanya yang membawa gunting untuk proses dibuka dan disharekannya hasil negosiasi, dan bukan yang menggunting pita perdamaian.

**Diagram 7**



Sumber: Data Primer

Keterangan : SL : Sangat dilibatkan; L : Dilibatkan; Bs : Biasa; TL : Tidak dilibatkan; STL : Sangat Tidak Dilibatkan

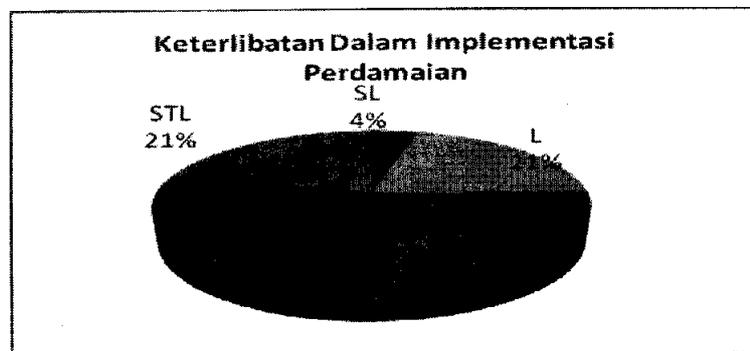
5. Keterlibatan perempuan dalam implementasi perdamaian.

Implementasi perdamaian merupakan aktivitas yang dilakukan paska dilakukan perjanjian damai antara pihak-pihak yang bertikai. Semisal dalam beberapa deklarasi damai dalam Piagam Malino di Ambon, maupun Deklarasi Helsinki, dalam konteks Aceh. Aktivitas implementasi perdamaian biasanya terdiri dari 3 aktivitas besar yakni proses demobilisasi, yakni mengembalikan konsentrasi masyarakat yang berkonflik ke masyarakatnya sendiri untuk tidak saling berhadap-hadapan. Dis-armament, yakni

melakukan perlucutan dan penghancuran senjata manakala konflik etnis tersebut menggunakan instrumen senjata, baik senjata api maupun senjata tajam. Re-integrasi, yakni berusaha menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik, terutama kombatan untuk menjadi warga sipil biasa, dan bukan lagi sebagai tentara sipil.

Tidak jauh berbeda dengan hasil di atas, sejumlah 51 % responden menyatakan bahwa perempuan tidak dilibatkan dalam implementasi perdamaian, sementara 25 % responden menyatakan perempuan dilibatkan

**Diagram 8**



Sumber: Data Primer

Keterangan : SL : Sangat dilibatkan; L : Dilibatkan; Bs : Biasa; TL : Tidak dilibatkan; STL : Sangat Tidak Dilibatkan

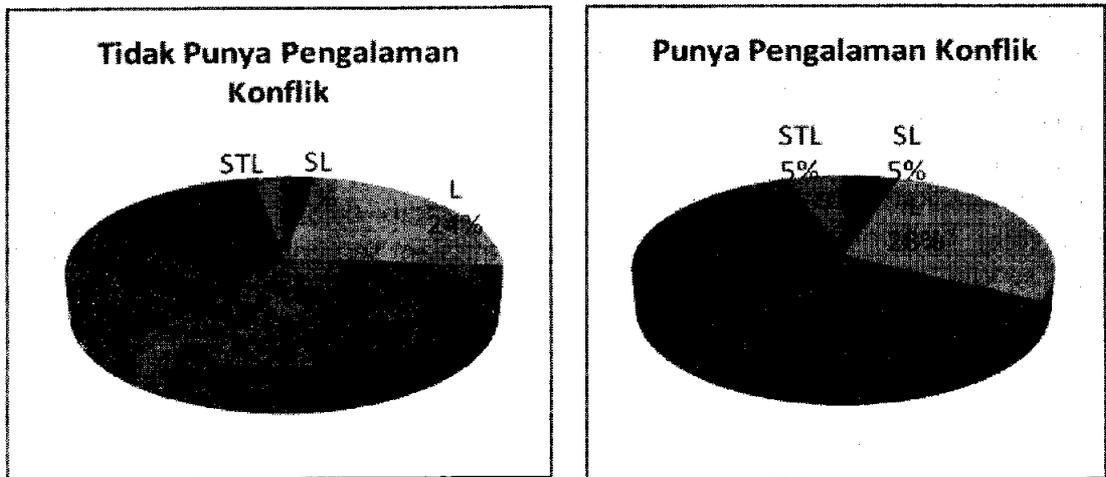
dan 24 % menyatakan biasa saja. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam *chart* di bawah ini :

Jika responden dipilah dari responden yang punya pengalaman konflik dan tidak mempunyai pengalaman konflik, hasilnya tampak dalam *chart* berikut :

Bagi responden yang memiliki pengalaman konflik, 33 % responden mengatakan perempuan dilibatkan dalam penyelesaian konflik etnis, sementara 34 % responden mengatakan tidak dilibatkan dan, 33 % sisanya mengatakan biasa saja. Sementara responden yang tidak memiliki pengalaman konflik mengatakan 26% responden mengatakan waita dilibatkan dalam penyelesaian konflik, 40% mengatakan tidak dilibatkan dan 34 % mengatakan biasa saja.

Dari hasil kuisisioner diatas ada kecenderungan bahwa lagi-lagi perempuan tidak banyak diperhitungkan dalam upaya penyelesaian konflik. Perempuan masih diposisikan sebagai obyek, belum dilibatkan sebagai subyek dalam upaya penyelesaian konflik termasuk hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek teknis penyelesaian konflik. Padahal perempuan sebagai (boleh dikatakan) korban utama dalam sebuah konflik etnis, yang merasakan bagaimana konflik itu dan merekalah yang harus menanggung akibat dari konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik juga harusnya mempertimbangkan aspek kebutuhan perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam masyarakat dan aspek traumatis yang harus mereka tanggung sebagai akibat konflik yang terjadi.

**Diagram 25**



*Keterangan : SL : Sangat dilibatkan; L : Dilibatkan; Bs : Biasa; TL : Tidak dilibatkan; STL : Sangat Tidak Dilibatkan*

**Kapasitas Mahasiswa Perempuan Sebagai Aktor Resolusi Konflik Etnis**

Untuk mengetahui bagaimana kapasitas perempuan sebagai aktor

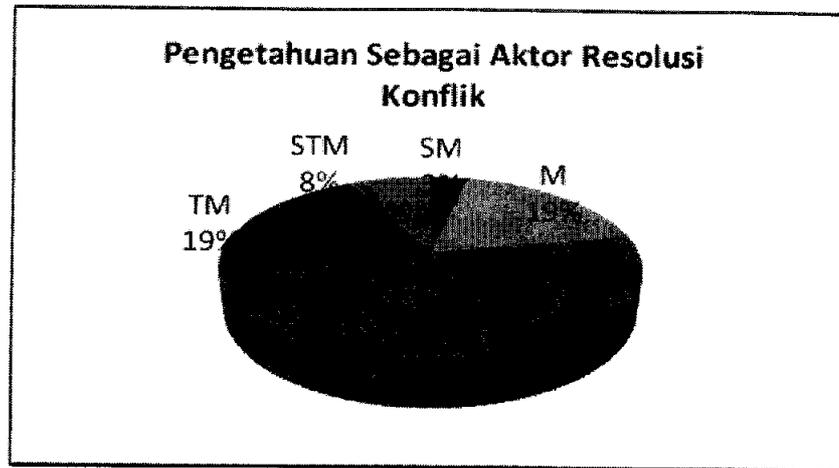
resolusi konflik etnis, maka diajukan beberapa pertanyaan berkenaan dengan ketrampilan dan pengetahuan dalam resolusi konflik yaitu pengetahuan

dan ketrampilan sebagai aktor resolusi konflik, tehnik negosiasi, pengalaman menyusun draft negosiasi konflik, pengalaman dalam monitoring, kapasitas sebagai *peace maker*, *peace builder*, mempublikasikan informasi konflik ke media massa serta kemampuan mem-persuasi pihak lain.

1. Ketrampilan dan pengetahuan Perempuan sebagai aktor resolusi konflik etnis

Pengetahuan sebagai agen resolusi konflik merujuk kepada kapasitas seorang perempuan di daerah konflik yang memiliki *social awareness* dan proaktif menjadi agen resolusi konflik. Kepemilikan perempuan akan pengetahuan sebagai agen resolusi konflik diharapkan berkontribusi positif bagi terselesainya konflik etnis secara damai dan mengurangi dampak konflik etnis terhadap perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Diagram 9



Sumber: Data primer

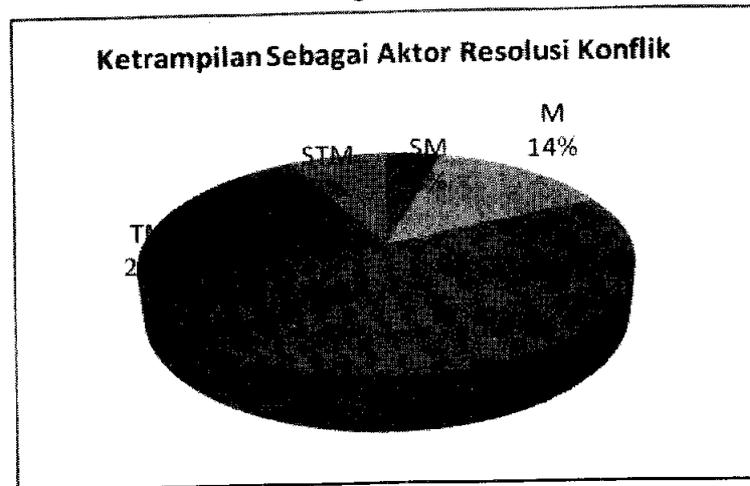
Keterangan : SM : Sangat Memadai; M : Memadai; Bs : Biasa; TM : Tidak Memadai; STM : Sangat Tidak Memadai

Secara umum, hanya 22% responden yang mengatakan perempuan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang resolusi konflik etnik. Sementara mayoritas responden (51%) mengatakan kemampuannya biasa saja dan 27% mengatakan tidak memadai. Hal tersebut tampak dalam chart berikut :

Sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat ketrampilan perempuan sebagai agen resolusi konflik menun-

jukkan bahwa perempuan mempunyai ketrampilan sebagai aktor resolusi konflik sejumlah 18%, lebih rendah dari pengetahuan sebagai agen resolusi konflik. Sementara yang menyatakan perempuan tidak mempunyai ketrampilan sebagai aktor resolusi konflik adalah sebanyak 30%. Sisanya sebanyak 52% responden menyatakan biasa saja. Hal tersebut terlihat dalam chart berikut ini :

**Diagram 10**



Sumber: Data primer

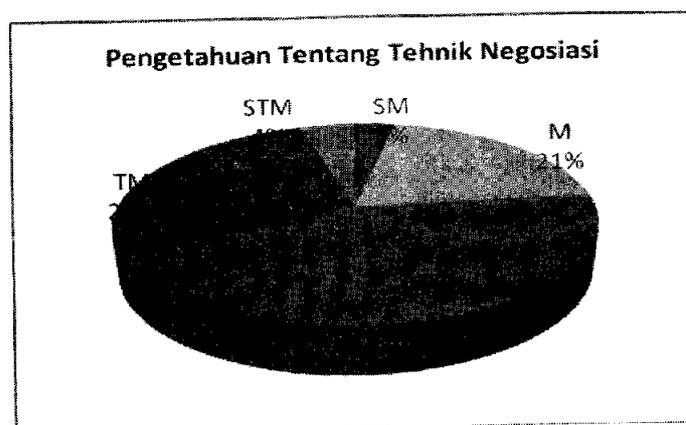
Keterangan : SM : Sangat Memadai; M : Memadai; Bs : Biasa; TM : Tidak Memadai; STM : Sangat Tidak Memadai

2. Ketrampilan dalam tehnik nego-  
siasi

Negosiasi merupakan cara bagaimana merundingkan kepentingan diri sendiri dan orang lain secara damai sehingga terciptanya kesepakatan dalam proses distribusi sumber daya yang selama ini menjadi sebab konflik. Dalam studi resolusi konflik dan

negosiasi, terdapat beberapa tehnik negosiasi seperti *contending* (menyering), *yielding* (mengalah), *inaction* (pasif sambil menunggu kesempatan yang baik) sampai dengan *withdrawal* (berpura-pura mundur). Tehnik-tehnik ini memungkinkan aktor negosiasi akan memiliki preferensi negosiasi sesuai dengan kepentingan yang hendak

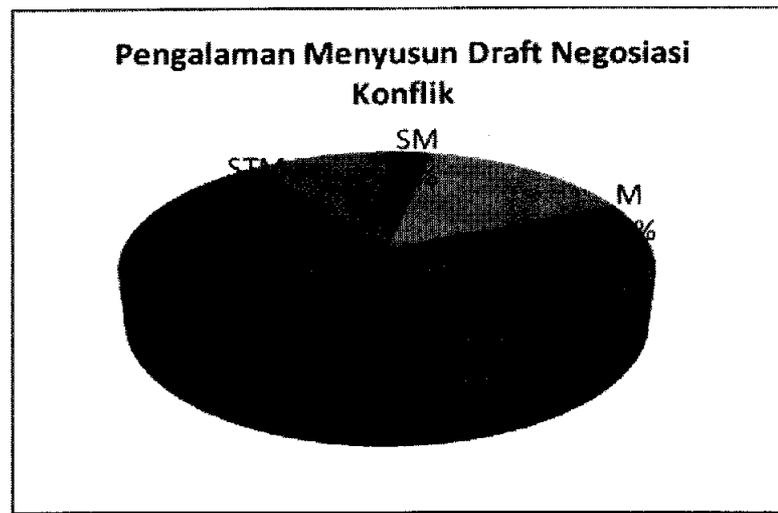
**Diagram 11**



Sumber: Data primer

Keterangan : SM : Sangat Memadai; M : Memadai; Bs : Biasa; TM : Tidak Memadai; STM : Sangat Tidak Memadai

Diagram 12



Sumber: Data primer

Keterangan : SM : Sangat Memadai; M : Memadai; Bs : Biasa; TM : Tidak Memadai; STM : Sangat Tidak Memadai

diperolehnya terkait dengan kapasitas pihak kompetitor negosiasi.

Pengetahuan responden tentang teknik negosiasi menunjukkan bahwa perempuan mempunyai pengetahuan yang biasa saja, sedangkan responden yang menyatakan perempuan mempunyai pengetahuan memadai sebanyak 24 %, selebihnya 32% menyatakan tidak memiliki kemampuan yang memadai. Berikut adalah hasil selengkapnya :

### 3. Pengalaman menyusun draft negosiasi konflik

Menyusun draft negosiasi hakekatnya adalah membangun rumah perdamaian bagi pihak-pihak yang berkonflik, di mana pihak-pihak yang berkonflik merasa terlindungi dan terakomodasi kepentingannya dalam rumah perdamaian tersebut. Aktivitas menyusun draft negosiasi adalah dari membuat range negosiasi, menyusun agenda

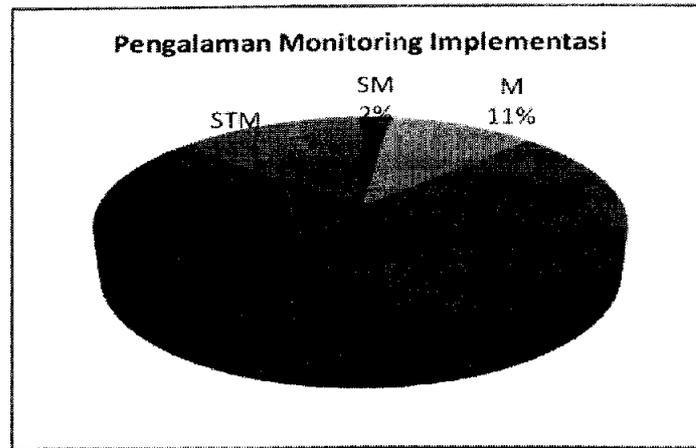
negosiasi, mengidentifikasi alternatif-alternatif solusi, sampai membuat roadmap perdamaian.

Survei menunjukkan bahwa 50 % responden menyatakan bahwa perempuan di daerah konflik tidak mempunyai pengalaman yang memadai, 32 % menyatakan pengetahuan yang biasa saja dan 18% menyatakan perempuan memiliki pengalaman memadai. Angka ini semakin menunjukkan bahwa ada kecenderungan besar perempuan tidak dilibatkan sebagai agen resolusi konflik karena masalah *lack capacity*.

### 4. Pengalaman dalam monitoring implementasi perjanjian

Monitoring merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam menjaga komitmen perdamaian dari pihak-pihak yang telah mengikat perjanjian damai. Aktivitas monitoring dalam konflik etnis berkisar pada aktivitas pemulihan atau rehabilitasi dampak konflik ataupun de-mobilisasi kekuatan yang se-

Diagram 13



Sumber: Data primer

Keterangan : SM : Sangat Memadai; M : Memadai; Bs : Biasa; TM : Tidak Memadai; STM : Sangat Tidak Memadai

lama ini dipergunakan untuk konflik.

Responden menyatakan bahwa perempuan di daerah konflik tidak memiliki pengalaman monitoring dan implementasi perdamaian yang memadai (52 %). Dan hanya 13 % responden menyatakan perempuan mempunyai pengalaman monitoring implementasi dan 35 % menyatakan biasa saja. Kondisi ini mencerminkan bahwa kapabilitas dan kapasitas perempuan di daerah konflik belumlah optimal. Dengan kondisi ini, upaya menjaga keberlangsungan perdamaian menjadi sangat fragil, sehingga tidak berlebihan jika di daerah yang pernah terjadi konflik etnis probabilitas terjadinya konflik etnis kembali cenderung besar.

##### 5. Kapasitas Perempuan sebagai *peace maker*

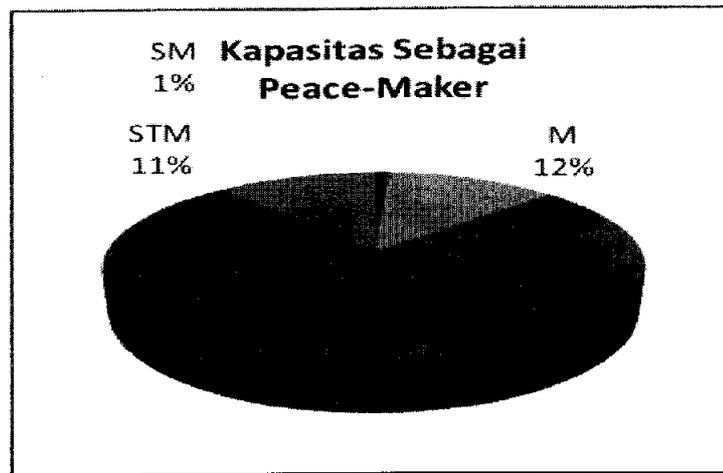
Seorang *peace-maker*, merupakan katalisator bagi terciptanya perdamaian. Seorang *peace-maker* akan senantiasa mengembangkan prinsip

hidup kebersamaan dan toleransi, dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap meningkatnya tensi ketegangan yang akan menjadi picu konflik. Aktivitas *peace-maker* merupakan aktivitas yang unik dan memerlukan kesabaran, ketekunan, maupun kerja keras.

Dalam kapasitas perempuan sebagai *peace-maker* di daerah konflik, responden juga cenderung menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas yang memadai (43%), 44% menyatakan biasa saja dan hanya 13% responden menyatakan perempuan memiliki kapasitas yang memadai sebagai *peace maker*. Kecenderungan ini sama persis dengan data sebelumnya terkait kapasitas perempuan sebagai aktor monitoring pasca perjanjian.

Pola ini dapat dibaca bahwa ada kecenderungan pendidikan tentang resolusi konflik di daerah konflik cenderung tidak dilaksanakan secara sistematis, baik dalam skala lokal maupun regional. Kondisi ini juga akan menye-

Diagram 14



Sumber: Data primer

Keterangan : SM : Sangat Memadai; M : Memadai; Bs : Biasa; TM : Tidak Memadai; STM : Sangat Tidak Memadai

babkan kompetisi antara provocator dan rekonsiliator dalam konflik etnis di Indonesia sedemikian rupa tidak seimbang. Sehingga sangat bisa difahami jika ledakan konflik etnis di Indonesia tampaknya akan senantiasa hadir, karena banyaknya kelompok politik di Indonesia yang memanfaatkan konflik etnis sebagai sarana mendapatkan kekuasaan.

#### 6. Kapasitas Perempuan Sebagai Peace Builder

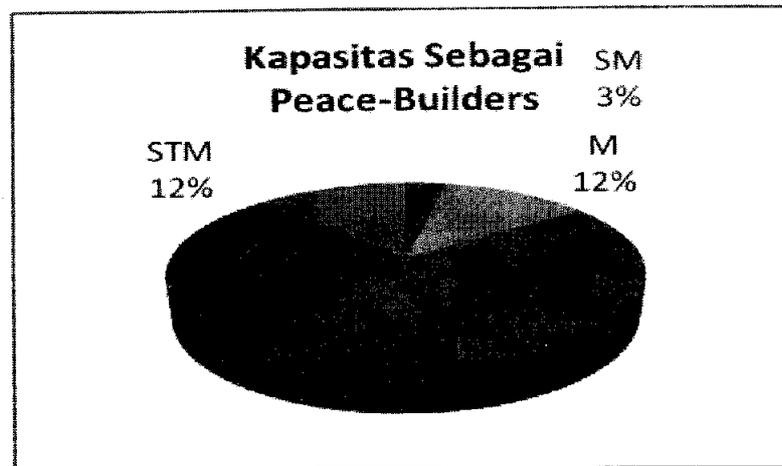
Dalam studi resolusi konflik dan perdamaian, *peace-builder* dimaknai sebagai aktor yang melakukan pembangunan perdamaian. Aktivitas ini terkait dengan menjaga agar perdamaian di suatu masyarakat bisa langgeng, yang ditandai dengan menguatnya nilai-nilai pluralisme di masyarakat. Penguatan nilai pluralisme memerlukan aktivitas yang sistematis dan *continue* di tengah masih kuatnya nilai-nilai kesukuaan yang berwatak *chauvinistik*, nilai yang menganggap

bahwa etniknya adalah yang paling baik dan benar.

Responden survei menyatakan bahwa perempuan di daerah konflik tidak mempunyai kapasitas memadai sebagai *peace builders* (39%), dan 46% menyatakan biasa saja. Hanya 15% responden yang menyatakan perempuan mempunyai kapasitas memadai sebagai *peace builder*. Perempuan secara kodrati sesungguhnya memiliki nilai feminis yang berpotensi sebagai elemen pembangun perdamaian, yang ditandai oleh kecenderungan untuk merawat sesuatu dengan hati-hati, mencintai sesuatu dengan tulus.

Rendahnya nilai feminisme dalam diri perempuan di daerah konflik juga merupakan sinyal buruk. Ada kecenderungan yang justru sebaliknya, bahwa kalangan perempuan justru menjadi penyebab bertahannya konflik etnis. Pilihan ini didasarkan argumen bahwa fungsi perempuan sebagai pendidik utama dalam keluarga, justru mentransformasikan nilai-nilai konflik dan

Diagram 15



Sumber: Data primer

Keterangan : SM : Sangat Memadai; M : Memadai; Bs : Biasa; TM : Tidak Memadai; STM : Sangat Tidak Memadai

kekerasan kepada anak, sebagai bentuk kompensasi atas kemalangan yang ia terima dari konflik.

#### 7. Kepemilikan Jaringan Perempuan

Dalam upaya menguatkan kapasitas perempuan dalam menghadapi ledakan dampak konflik bagi perempuan adalah kepemilikan jaringan perempuan. Dalam konteks konflik etnis, seperti yang diungkap oleh Sri Rejeki maupun Thamrin Tamagola, bahwa persoalan perempuan di daerah yang mengalami konflik etnis seringkali bukan menjadi prioritas pertama yang akan diselesaikan. Masalah perempuan seringkali dianggap sebagai masalah sekunder bahkan tersier. Kondisi semakin memperburuk dampak konflik etnis kepada perempuan, sehingga korban perempuan akan semakin mengalami trauma berkepanjangan.

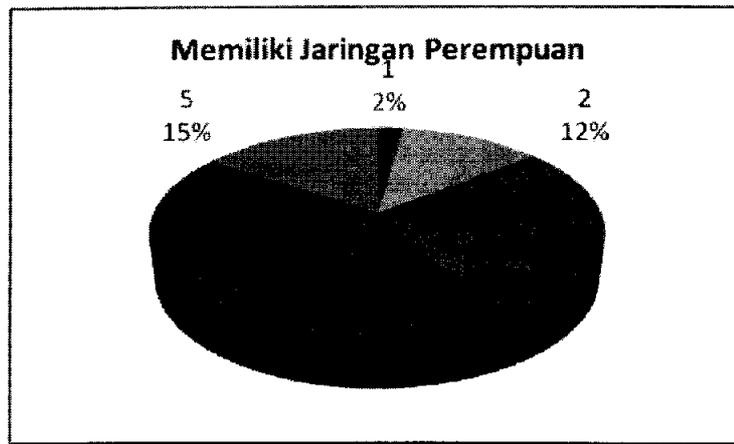
Diagram di atas menggambarkan bahwa Keberadaan jaringan perempuan di negara-negara yang memiliki keragaman etnis yang tinggi meru-

pakan kebutuhan yang sangat mendasak. Responden juga meragukan perempuan memiliki jaringan dengan perempuan dalam isu-isu konflik. Sejumlah 48 % responden menyatakan hal tersebut, 28 % menyatakan biasa saja, dan hanya 14 % yang menyatakan perempuan memiliki jaringan yang memadai.

#### 8. Keahlian Mempublikasikan Informasi Dampak Konflik ke Media Massa

Keahlian dalam mempublikasikan issue perempuan dalam konteks konflik etnis adalah bagaimana seseorang perempuan bisa menulis tentang kejadian yang dilihat, didengar dalam konflik etnis untuk kemudian dapat diterima oleh media massa sebagai sebuah berita (*news*) yang ditempatkan sebagai salah satu berita yang penting (*headline*). Media massa seringkali lebih mengekspos kerusakan-kerusakan fisik yang disebabkan oleh konflik etnis dibandingkan dengan korban

Diagram 16



Sumber: Data primer

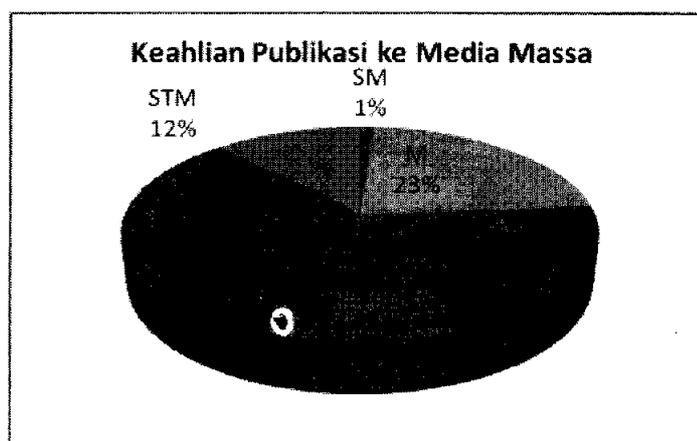
Keterangan : SM : Sangat Memadai; M : Memadai; Bs : Biasa; TM : Tidak Memadai; STM : Sangat Tidak Memadai

jiwa, ataupun korban psikis. Menjadi penting bagi aktor resolusi konflik untuk memberikan informasi yang detail tentang dampak konflik terhadap kualitas perempuan sehingga intervensi kemanusiaan untuk kepentingan perempuan juga bisa diakomodasi.

Survei menunjukkan bahwa keahlian perempuan dalam mempublikasikan informasi dampak konflik termasuk

masih rendah, di mana ditandai 45% responden menyatakan perempuan tidak memiliki keahlian yang memadai, 31% menyatakan biasa saja dan 24% menyatakan perempuan mempunyai keahlian tersebut. Angka ini memang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas menjadi *peace maker* maupun *peace builder*.

Diagram 17



Sumber: Data primer

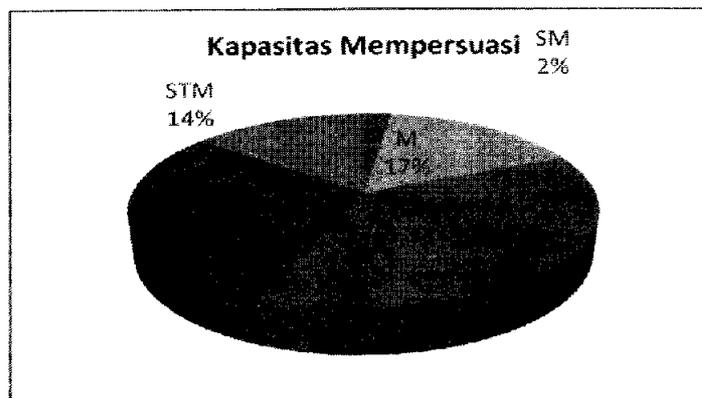
Keterangan : SM : Sangat Memadai; M : Memadai; Bs : Biasa; TM : Tidak Memadai; STM : Sangat Tidak Memadai

### 9. Kapasitas Mempersuasi Pihak Lain

Yang dimaksud dengan kapasitas mempersuasi pihak lain adalah mempengaruhi cara berfikir dan bertindak orang-orang yang sedang berkonflik untuk lebih memilih berkonflik dengan pendekatan damai, dan menyelesaikan konflik tersebut secara damai. Terdapat kecenderungan besar, konflik etnis di

Indonesia sebagai konflik primordial, sehingga pendekatan emosional lebih mengedepan dibandingkan pendekatan rasional. Sehingga bentuk operasional dari kapasitas mempersuasi adalah bagaimana seorang agen resolusi konflik dapat mengubah cara pandang aktor yang berkonflik dalam melihat kompetitornya, dari cara pan-

**Diagram 18**



Sumber: Data primer

Keterangan : SM : Sangat Memadai; M : Memadai; Bs : Biasa; TM : Tidak Memadai; STM : Sangat Tidak Memadai

dang sebagai musuh menjadi sebagai mitra.

Survei menunjukkan bahwa kapasitas perempuan dalam mempersuasi pihak lain juga relatif rendah, di mana 44% responden menyatakan perempuan tidak memiliki kapasitas yang memadai dan hanya 19 % yang menyatakan memiliki kapasitas mempersuasi yang memadai dan 37 % menyatakan biasa saja.

### Simpulan

Perempuan merupakan elemen masyarakat yang paling berpotensi menanggung beban yang paling besar dari keberadaan konflik etnik, dari

peluang menjadi korban pelecehan seksual, sebagai pengungsi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi penyangga kehidupan ekonomi keluarga jika para suami-suami telah menjadi korban. Data penelitian didapat dari sumber utama yaitu para perempuan yang terlibat atau terkena dampak konflik etnis di beberapa daerah konflik melalui metode *semi structured group* dan *deep interview*. Data ini dikumpulkan melalui penelitian survei terhadap 200 responden, yang terdiri dari aktivis beberapa kampus di Yogyakarta, maupun pengurus Organisasi Mahasiswa Daerah di Asrama Mahasiswa Daerah di Yogyakarta.

Dari data tersebut diketahui bahwa pandangan umum perempuan mengenai konflik menunjukkan sebesar 30% responden menyatakan konflik sebagai suatu yang samangat tidak berguna. Sebanyak 49% respondeng yang memiliki pengalaman konflik mengatakan konflik etnis sebagai sesuatu yang tidak berguna, sementara sebanyak 46% responden yang tidak memiliki pengalaman konflik menyatakan konflik adalah sesuatu yang tidak berguna sebanyak 36%.

### Daftar Pustaka

- Ari Dwipayana, AA.GN., (2001) "Pluralisme, Konflik dan Perdamaian", makalah yang Disampaikan sebagai pengantar diskusi dalam Seminar Sehari "Pluralisme, Konflik dan Perdamaian", yang diselenggarakan oleh Interfidie di Bengkulu
- Babbit, E. F. and D'Estree, T. P. (1996). *'An Israeli-Palestinian Women's Workshop' in Crocker, Chester A., Hampson, Fen Osler, and Pamela. Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict.* Washington, DC: United States Institute of Peace
- Bouta and Freaks (2002), *Women's Role in Conflict Prevention, Conflict Resolution and Post Conflict Reconstruction*, Netherlands Institute of International Relations. Conflict Research Unit
- Chinkin, Christine. (2004), "Peace Agreements as a Means for Promoting Gender Equality and Ensuring Participation of Women." Expert Group Meeting Report. New York: United Nations Division for the Advancement of Women.
- Focus Group Discussion (FGD), (2006) "Identifikasi Isu-isu Strategis yang Berkaitan dengan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa", dilaksanakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta
- Gutman, Roy and David Rieff (eds.), (1999), *Crimes of War: What the Public Should Know*, New York, Internews Europe
- Haryanto, Sindung , (2003), *Pola Hubungan Antara Golongan, Stereotype Etnik dan Rekonsiliasi Konflik: Studi Pola Hubungan Antar Golongan Pada Masyarakat Majemuk Dalam Perspektif Feminisme*, Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan, Universitas Bandar Lampung
- Hill, Felicity. (2003) "The Elusive Role of Women in Early Warning and Conflict Prevention." *Conflict Trends*
- Sylvester, C (1994), *Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era.* New York: Cambridge University Press
- Inclusive Security (2005), *Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action Conflict Prevention, Resolution and Reconstruction*, Women Waging Peace, International Alert
- Marlay, Ross Marlay and Clark D Neher (1999), *Democracy in Southeast Asia: Wind and Change*
- Rizal, Samsul Panggabean, (2003), "Approaches to Ethnic and religious Conflict" dalam Lambang Trijono (ed), *The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia: Case and Resolution*, Yogyakarta, CSPS Books, 2003
- Samsu, Bambang Badriyanto, (2006) "Karakteristik Etnik dan Hubungan Antar Etnik: Kasus di Kabupaten Sumenep Madura", yang mengutip tulisan Chang, William, Etnonasionalisme, dalam Kompas 3 Oktober 2006
- Schmeidl, Susanne, and Piza-Lopez, Eugenia. (2002), *Gender and Conflict Early Warning. A Framework for Action London an Berne: International Alert and Swiss Peace Foundation*
- Sidney, Elizabeth (2003), *Gender and Democracy: What Works?*, The British Council. United Kingdom.
- Sutarto, Ayu, (2006), *Menjinakkan Globalisasi*, Jember, Kompyawisda
- Term of reference FGD, (2009), "Policing dan Kamtibmas Dalam Rangka Pemeliharaan Perdamaian Pasca Konflik di Indonesia", Democracy Process: Transitional Justice and Law Enforcement, Pro Patria Institute
- Tim Lembaga Informasi Nasional, (2004), *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi: Informasi Potensi Konflik dan Potensi Integrasi Bangsa (Nation and Character Building)*, Jakarta, Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia
- Trista, Endah Agustina dan Maria Pakpahan (2004), Kajian independen di Sulawesi Tengah dan di Maluku Utara: Perempuan dan Pembangunan Perdamaian Di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara
- United Nations, (2005), *In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All*, Report of the UN Secretary- General, New York, UN
- Women, War, Peace, and Peace Negotiations, (2004), New York: United Nations Development Fund for Women